REKOMENDASI RESOLUSI KONFLIK DI DESA WADAS MENGUNAKAN METODE TINJAUAN PUSTAKA

Fadhlizha Izzati Rinanda Firamadhina¹ dan Moch Reski Fauzi²

^{1,2}Program Studi Ilmu Kesejahteraan Sosial FISIP Universitas Padjadjaran

E-mail: fadhlizha19001@mail.unpad.ac.id, moch19012@mail.unpad.ac.id

ABSTRAK

Tulisan ini berfokus pada analisis dan rekomendasi terhadap resolusi konflik di Desa Wadas, Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah. Aspek yang diteliti dalam tulisan ini adalah resolusi konflik yang telah dilakukan atau telah diterapkan di Desa Wadas menggunakan pendekatan yang dijabarkan oleh Nulhaqim dkk serta merekomendasikan upaya resolusi konflik seperti apa yang sebaiknya dilakukan untuk meredakan konflik yang terjadi di Desa Wadas. Tulisan ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan teknik pendekatan studi pustaka, dimana penulis mendeskripsikan fenomena situasi dan masalah secara komprehensif dengan mengumpulkan dari sumber-sumber ilmiah yang relevan dengan tema yang dibahas. Tujuan penulis menganalisis permasalahan di Desa Wadas yakni agar memberikan gambaran secara komprehensif mengenai runtutan kronologi konflik yang terjadi di Desa Wadas serta menganalisis bagaimana resolusi yang sudah dilakukan dan direncanakan serta memberikan rekomendasi upaya resolusi konflik yang sebaiknya dilakukan untuk menyelesaikan konflik yang terjadi di Desa Wadas. Kesimpulan yang dapat ditarik dari penulisan ini adalah terdapat beberapa rekomendasi resolusi konflik yang diusulkan oleh akademisi dan praktisi serta pemangku pemerintah.

Kata Kunci: Konflik, Resolusi Konflik, Desa Wadas.

ABSTRACT

This paper focuses on analysis and recommendations for conflict resolution in Wadas Village, Purworejo District, Central Java Province. The aspect examined in this paper is the conflict resolution that has been carried out or has been implemented in Wadas Village using the approach described by Nulhaqim et al as well as recommending what kind of conflict resolution efforts should be carried out to mitigate the conflict that occurred in Wadas Village. This paper uses a qualitative research method with a literature study approach, in which the author describes the phenomena of the situation and problems comprehensively by gathering from scientific sources relevant to the themes discussed. The author's goal is to analyze the problems in Wadas Village, namely to provide a comprehensive picture of the chronological sequence of conflicts that occurred in Wadas Village and to analyze how the resolutions have been carried out and planned and to provide recommendations for conflict resolution efforts that should be carried out to resolve conflicts that occurred in Wadas Village. The conclusion that can be drawn from this writing is that there are several conflict resolution recommendations proposed by academics and practitioners as well as government stakeholders.

Keywords: Conflict, Conflict Resolution, Wadas Village.

PENDAHULUAN

Konflik merupakan hal yang sulit dihindari oleh suatu masyarakat, konflik dapat terjadi karena adanya perbedaan pendapat, pemikiran, atau bahkan terjadi karena adanya kesalahpahaman antara pihak-pihak yang berkonflik (Arya Hadi, 2006). Mengutip dari Webster (2016) dalam modul sosiologi, istilah “*conflict*” di dalam bahasa Inggris berarti suatu perkelahian, peperangan atau perjuangan, yaitu berupa pertentangan fisik antara

beberapa pihak. Sedangkan, konflik atau pertentangan secara harfiah dapat diartikan sebagai suatu proses sosial antara dua pihak atau lebih ketika pihak yang satu berusaha menyingkirkan pihak lain dengan cara menghancurkan atau membuatnya tidak berdaya. Latar belakang adanya konflik adalah adanya perbedaan yang sulit ditemukan kesamaannya atau didamaikan baik itu perbedaan kepandaian, ciri fisik, pengetahuan, keyakinan, dan adat istiadat.

Menurut Wirawan (2016), kriteria yang menandai suatu pertentangan sebagai konflik adalah sebagai berikut:

1. Sebuah konflik harus melibatkan dua pihak atau lebih di dalamnya;
2. Pihak-pihak tersebut saling tarik-menarik dalam aksi-aksi saling bermusuhan (*mutually opposing actions*);
3. Mereka biasanya cenderung menjalankan perilaku koersif untuk menghadapi dan menghancurkan “musuh”;
4. Interaksi pertentangan di antara pihak-pihak itu berada dalam keadaan yang tegas, karena itu keberadaan peristiwa pertentangan dapat dideskripsikan dengan mudah oleh para pengamat sosial yang tidak terlibat dalam pertentangan.

Menurut Coser (1957), konflik yang terjadi di masyarakat dikarenakan adanya kelompok lapisan bawah yang semakin mempertanyakan legitimasi dari keberadaan distribusi sumber-sumber langka. Coser menilai bahwa konflik tidak selalu bersifat negatif, namun konflik dapat mempererat dan menjalin kerukunan dalam suatu kelompok. Tiga faktor yang mempengaruhi lama tidaknya suatu konflik di masyarakat, yaitu sebagai berikut:

- a. Luas sempitnya tujuan konflik sosial.
- b. Adanya pengetahuan maupun kekalahan dalam konflik.
- c. Adanya peranan pemimpin dalam memahami biaya terjadinya konflik dan persuasi pengikutnya.

Konflik dapat menjaga hubungan antarkelompok dan memperkuat kembali identitas kelompok. Adapun manfaat konflik menurut Coser, adalah sebagai berikut:

- a. Konflik dapat menjadi media untuk berkomunikasi.
- b. Konflik dapat memperkuat solidaritas kelompok.
- c. Konflik dengan kelompok lain dapat menghasilkan solidaritas di dalam kelompok tersebut dan

solidaritas tersebut dapat mengantarkan kepada aliansi dengan kelompok lain.

- d. Konflik dapat menyebabkan anggota masyarakat yang terisolasi menjadi berperan aktif.

Kemudian, Coser mengelompokkan konflik sosial menjadi dua macam, yaitu konflik realistik dan konflik non-realistik.

- a. Konflik Realistik konflik realistik adalah konflik yang berasal dari kekecewaan individu atau kelompok atas tuntutan maupun perkiraan-perkiraan keuntungan yang terjadi dalam hubungan sosial.
- b. Konflik Non-Realistik Konflik non-realistik merupakan konflik yang bukan berasal dari tujuan-tujuan saingan yang bertentangan, melainkan dari kebutuhan untuk meredakan ketegangan.

Buckles, D and Rusnak, G. (1999) Menyampaikan Secara umum strategi resolusi konflik sepantasnya harus dimulai dengan pengetahuan yang mencukupi tentang peta atau profil konflik sosial yang terjadi di suatu kawasan. Dengan berbekal peta tersebut, segala kemungkinan dan peluang resolusi konflik diperhitungkan dengan cermat, sehingga setiap manfaat dan kerugiannya dapat dikalkulasikan dengan baik. Seringkali dijumpai banyak kasus bahwa sebuah pilihan solusi-tindakan rasional untuk mengatasi konflik sosial, tidaklah benar-benar mampu menghapuskan akar-persoalan konflik secara tuntas dan menyeluruh. Pada kasus-kasus yang demikian itu, maka resolusi konflik sepantasnya dikelola (*conflict management*) pada derajat dan suasana yang sedemikian rupa sehingga ledakan berupa “*clash-social*” yang bisa berdampak sangat destruktif dapat dihindarkan.

Melalui penelusuran dari studi terdahulu mengenai berbagai konflik yang terjadi di berbagai belahan dunia, serta berdasarkan kerangka konseptual dan teoritis mengenai konsep dan teori resolusi konflik yang banyak dikembangkan dalam dunia akademis, maka tidak berlebihan

untuk mengatakan bahwa jika kita dihadapkan dengan situasi konflik maka kita harus mulai memikirkan apa yang dalam pemaparan berikutnya dikenal sebagai “Resolusi Konflik”.

Tidwell (1998) memperkenalkan sebuah mekanisme yang nantinya akan menunjukkan kita untuk mengambil langkah-langkah resolusi: pertama, diawali dengan mempertanyakan apakah konflik yang terjadi berguna apa tidak? Harus ditanamkan dalam benak kita bahwa konflik tidak akan berguna apabila sudah merenggut korban nyawa dan harta, tetapi harus dipahami bahwa banyak konflik (tanpa kekerasan) membawa kemajuan dan menguntungkan kita. Kemudian, kedua, mencari sumber dari konflik tersebut, dilanjutkan dengan langkah ketiga menentukan mekanisme penyelesaian, dan terakhir keempat, mengaplikasikan mekanisme tersebut.

Desa Wadas merupakan salah satu desa yang terletak di Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah. Akar konflik agraria di Desa Wadas bermula dari rencana pembangunan Bendungan Bener yang akan menampung air dari Sungai Bogowonto. Pembangunan bendungan itu termasuk dalam rencana Proyek Strategis Nasional (PSN) dan pembangunannya diperkirakan menelan biaya Rp 2,06 triliun. Permasalahan muncul karena salah satu material untuk membangun Bendungan Bener adalah batu andesit, yang rencananya akan ditambang dari Desa Wadas.

Dilansir dari laporan Project Multatuli, 24 Mei 2021, Kepala Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Bendungan Bener, M Yushar mengatakan bahwa bukit di Wadas menyimpan batu andesit sebanyak 40 juta meter kubik. Namun, Yushar mengatakan bahwa batu andesit yang diambil dari perut Wadas hanya 8,5 juta meter kubik selama dua hingga tiga tahun. Ia mengatakan para pemilik tanah di bukit itu akan mendapat "ganti untung" minimal Rp120.000 per meter persegi. Setelah itu tanah dikuasai pemerintah, tetapi setelah direstorasi, masyarakat dapat memanfaatkannya lagi

melalui kesepakatan antara Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) dengan Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak (BBWSSO).

Dari kasus ini masyarakat secara garis besar mengkhawatirkan dua permasalahan utama. Pertama, warga khawatir penambangan batu andesit akan merusak 28 titik sumber mata air yang ada di kampung tersebut. Padahal keberadaan sumber mata air itu sangat vital untuk menopang pertanian di Desa Wadas, di mana mayoritas warga bekerja sebagai petani. Kedua, warga khawatir penambangan batu andesit akan membuat kawasan Desa Wadas menjadi semakin rentan terkena longsor. Kekhawatiran ini muncul berdasarkan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purworejo 2011-2031, dimana Kecamatan Bener (termasuk di dalamnya Desa Wadas) merupakan bagian dari Kawasan Rawan Bencana Tanah Longsor. Menurut Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi), tambang yang mengganggu ketentraman warga Desa Wadas saat ini merupakan tambang quarry atau penambangan terbuka (dikeruk tanpa sisa).

Penambangan direncanakan berjalan selama 30 bulan dengan cara dibor, dikeruk, dan diledakkan menggunakan 5.300 ton dinamit atau 5.280.210 kg, hingga kedalaman 40 meter. Tambang quarry batuan andesit di Desa Wadas menargetkan 15,53 juta meter kubik material batuan andesit untuk pembangunan Bendungan Bener, dengan kapasitas produksi 400.000 meter kubik setiap tahunnya. Walhi menyebutkan, jika penambangan batu andesit di Desa Wadas benar-benar terjadi, maka akan menghilangkan bentang alam dan tidak ada bedanya dengan memaksa warga untuk hidup dengan kerusakan ekosistem.

Sementara itu, Rencana konstruksi proyek Bendungan Bener telah dimulai sejak 2018 dan direncanakan mulai beroperasi pada 2023 mendatang. Pembangunan ini dianggarkan melalui dana APBN dan APBD.

Penelitian ini penting untuk diteliti dengan konsep konflik sosial yang dikemukakan oleh Nulhaqim karena untuk melihat bagaimana proses terjadinya konflik yang terjadi di Desa Wadas, konflik yang terjadi di Desa Wadas ini juga masih berlangsung dan belum memiliki titik terang terkait dengan resolusi konfliknya. Tak hanya itu, tulisan ini juga akan berfokus pada usaha resolusi konflik baik yang telah dilaksanakan maupun yang sudah direncanakan. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan menggunakan beberapa sumber literatur ilmiah seperti buku, jurnal, artikel, atau berita yang relevan dengan topik penelitian. Dimana metode ini sesuai dengan penulisan ini yang mendeskripsikan secara komprehensif bagaimana analisis konflik yang terjadi di Desa Wadas. Penelitian ini merupakan jenis kualitatif melalui studi pustaka. Tahapan penelitian dilaksanakan dengan menghimpun sumber kepustakaan, baik primer maupun sekunder. Penelitian ini melakukan klasifikasi data berdasarkan formula penelitian (Darmalaksana, 2020).

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan manfaat bagi khazanah ilmu pengetahuan terutama dalam kaitannya dengan resolusi konflik yang terjadi di Desa Wadas, mendeskripsikan bagaimana konflik yang terjadi di Desa Wadas dapat berlangsung serta bagaimana pelaksanaan resolusi konflik yang telah dilaksanakan. Diharapkan penelitian ini dapat menjadi referensi pemecahan konflik yang terjadi di Desa Wadas sebagai upaya resolusi konflik.

METODE PENELITIAN

Pendekatan yang akan digunakan dalam penulisan artikel ini adalah pendekatan resolusi konflik yang dikemukakan oleh Nulhaqim. Nulhaqim (2017) mengusulkan lima aspek konflik untuk dikaji yakni dimulai dari peristiwa konflik, pemicu konflik, penyebab konflik, dampak dari konflik yang terjadi, dan resolusi konflik yang dilakukan untuk mengatasi konflik

yang terjadi. Fokus dari tulisan ini adalah menganalisis resolusi konflik yang sudah dilakukan di Desa Wadas. Metode penulisan yang akan digunakan adalah metode studi kepustakaan atau *literature review*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konflik Wadas

Konflik yang terjadi di Desa Wadas, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah merupakan konflik agraria yang telah berlangsung sejak tahun 2019 hingga saat ini. Konflik Wadas timbul antara pihak warga Desa Wadas dan Pemerintah Indonesia, lebih tepatnya dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Tentara Nasional Indonesia. Dilansir dari BBC News Indonesia, konflik Wadas berlatar belakang oleh rencana pemerintah dalam membuka penambangan terbuka batuan andesit yang berada di wilayah desa tersebut untuk dijadikan bahan baku pembangunan Bendungan Bener yang masih satu kecamatan dengan wilayah desa ini. Menurut masyarakat setempat, penambangan batu ini akan merusak lingkungan desa.

Pada tahun 2017, pemerintah menetapkan pembangunan Bendungan Bener sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN) melalui Perpres Nomor 58 Tahun 2017. Bendungan tersebut rencananya akan mengairi lahan seluas 15.069 hektar dan menyediakan pasokan air baku sebesar 1,60 meter kubik per detik (Utami & Firdaus, 2022). Selain itu, Bendungan Bener juga akan digunakan sebagai pembangkit listrik yang diperkirakan akan mampu menghasilkan daya sebesar 6 megawatt. Proyek tersebut rencananya menggunakan material andesit dari bukit di Desa Wadas, yang disebut sebagai "batu lemosoh" oleh warga setempat (Nuswantoro, 2018).

Pada 27 Maret 2018, warga Wadas melakukan penolakan rencana tersebut dengan berdemo di depan Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak (BBWSO). Demonstrasi tersebut dilakukan

ketika 100 orang yang terdampak pembebasan lahan menerima sosialisasi dari pihak BBWS. Beberapa orang yang tidak setuju terhadap rencana tersebut langsung meninggalkan sosialisasi dan bergabung dalam aksi demonstrasi.

Pada 7 Juni 2021, Ganjar Pranowo mengeluarkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 590/20 Tahun 2021 tentang Pembaruan Atas Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Bendungan Bener di Kabupaten Purworejo dan Kabupaten Wonosobo Provinsi Jawa Tengah. Pada 15 Juli 2021, warga Desa Wadas melalui Gerakan Peduli Alam Desa Wadas (Gempadewa) menuntut Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Semarang atas diterbitkannya SK Gubernur tentang lokasi pengadaan tanah Bendungan Bener. Tuntutan tersebut ditolak oleh PTUN Semarang melalui putusan pada 30 Agustus 2021 (Harjanto, 2022). Pada 14 September 2021, warga Wadas melakukan kasasi atas putusan tersebut. Kuasa hukum Wadas, Hasrul Buamona, beranggapan bahwa putusan tersebut tidak memiliki dasar hukum dan menganggap bahwa majelis hakim tidak mempertimbangkan aspek pengelolaan ruang hidup yang baik dan sehat (Gandhawangi, 2021).

Konflik di antara kedua pihak membesar pada April 2021 dan Februari 2022, dengan laporan dari masyarakat bahwa beberapa warga mengalami tindak kekerasan yang dilakukan oleh tentara dan polisi. Dari kedua peristiwa itu, sedikitnya total 78 orang dari pihak warga Desa Wadas ditahan oleh pihak kepolisian (Syambudi & Bernie, 2021; CNN Indonesia, 2022).

Penyebab terjadinya konflik agraria tersebut adalah sebagian warga menolak rencana aktivitas penambangan batu andesit. Penolakan tersebut ditandai dengan serangkaian aksi protes yang berujung bentrokan dengan aparat yang bersenjata lengkap hingga penangkapan Warga Desa Wadas.

Kejadian di Desa Wadas dinyatakan sebagai konflik agraria karena terdapat proses dua proyek pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Proyek pertama adalah pengadaan tanah untuk kepentingan umum dengan tujuan pembangunan bendungan, dan proyek kedua adalah pengadaan tanah untuk kepentingan umum yaitu penambangan batu andesit yang digunakan untuk membangun proyek pertama (Bendungan Bener). Pilihan pemerintah untuk mengedepankan tindakan represif melalui aparat berujung pada konflik antara aparat dengan warga Desa Wadas yang menolak proyek penambangan.

Rekomendasi Resolusi Konflik Oleh Akademisi dan Praktisi

Konflik Wadas menimbulkan beberapa resolusi konflik yang mampu direkomendasikan oleh akademisi maupun praktisi dalam lingkup kajian resolusi konflik. Berikut beberapa rekomendasi resolusi konflik yang diusulkan dari berbagai sumber. Aliardo (2022) mengusulkan beberapa pendekatan yakni:

1. Pertama, memastikan bahwa akses ekonomi masyarakat atau mata pencaharian masyarakat di desa Wadas tidak ada yang terganggu satu orang pun akibat dilakukannya penambangan batuan andesit di wilayah mereka;
2. Kedua, adanya penambahan lapangan pekerjaan baru yang layak dan bermartabat bagi warga desa Wadas akibat dilakukannya penambangan andesit di desa tersebut;
3. Ketiga, kepastian secara amdal bahwa penambangan batuan andesit di desa Wadas tidak akan mengakibatkan bencana seperti yang dikhawatirkan oleh warga desa Wadas;
4. Keempat, adanya jaminan kepastian dari pemerintah apabila ternyata di kemudian hari terjadi bencana akibat penambangan batuan andesit di desa Wadas, maka pemerintah

akan menjamin ganti rugi yang layak dan patut bagi korban serta relokasi yang sesuai dengan kondisi alam dan lingkungan desa Wadas sebelum adanya penambangan batuan andesit di desa Wadas;

5. Kelima, adanya jaminan dan kepastian dari pemerintah bahwa ruang hidup masyarakat tidak akan terganggu akibat dilakukannya penambangan batuan andesit di desa Wadas.

Aliardo (2022) mengatakan bahwa untuk mencapai pendekatan-pendekatan yang telah dijelaskan, pemerintah perlu membuat suatu kebijakan dan komitmen secara khusus yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum demi kepastian pemenuhan hak masyarakat di Desa Wadas yang sudah pasti sedikit atau banyak akan terdampak dari penambangan batuan andesit di desa mereka.

Sibuea (2022) menjabarkan kajiannya dengan mencantumkan rekomendasi resolusi konflik yang direkomendasikan oleh Komisi III DPR RI yakni:

1. Pemerintah daerah dan stakeholder terkait diharapkan melakukan pendekatan dialogis untuk sosialisasi dan komunikasi secara intensif terhadap warga masyarakat di lokasi PSN maupun daerah sekitar atau penunjang (baik yang setuju maupun belum setuju dengan pengalihan hak);
2. Pemerintah daerah (gubernur), Badan Pertanahan Nasional (BPN), dan Balai Besar Wilayah Sungai melakukan kajian, evaluasi, dan penghitungan kembali akan kebutuhan dan sumber batu *quarri* andesit sebagai penunjang pembangunan Bendungan Bener;
3. Gubernur Provinsi Jawa Tengah bersama dengan BPN dan Balai Besar Wilayah Sungai melakukan evaluasi kembali pemetaan lokasi tanah yang disesuaikan dengan kebutuhan batu andesit untuk

- pembangunan Bendungan Bener dan penyelesaian proses ganti rugi;
4. Balai Besar Wilayah Sungai agar merealisasikan komitmen pada rapat dengar pendapat dengan Komisi III DPR RI pada 11 Februari 2022 untuk menetapkan lokasi jalan yang tidak mengganggu kegiatan warga masyarakat dan tidak memberikan pekerjaan tersebut pada pihak ketiga atau pihak lain;
 5. Komisi III DPR RI meminta agar pihak Kepolisian Daerah Jawa Tengah melakukan pendekatan dialogis dan humanis terhadap seluruh warga (baik yang setuju maupun tidak setuju), serta mengedepankan keadilan restoratif dalam rangka menjaga kondusivitas keamanan dan ketertiban masyarakat;
 6. Komisi III DPR RI meminta agar pemerintah segera menuntaskan pembayaran ganti rugi terhadap warga masyarakat yang berada di lokasi PSN Bendungan Bener yang telah setuju untuk mengalihkan haknya secara cepat melalui diskresi atau keputusan Menteri;
 7. Komisi III DPR RI akan melakukan pengawasan dan pemantauan secara berkelanjutan terhadap proses penyelesaian sengketa secara berkeadilan antara pemerintah dengan warga pemilik tanah.

KESIMPULAN

Berdasarkan pemaparan konflik yang terdapat di bagian pendahuluan dan pembahasan, dapat ditarik kesimpulan bahwa Konflik Wadas merupakan konflik agraria dan konflik lingkungan dan terdapat beberapa rekomendasi yang diajukan oleh akademisi, praktisi, dan pemangku pemerintah dalam menyelesaikan Konflik Wadas.

DAFTAR PUSTAKA

- Adler, P. S. 2000. *Natural Resources Conflict Resolution: Water, Science, and The Search for Common Ground*. 1st Australian Natural Resources Law and Policy Conference. Canberra.
- Aliardo, M. (2022). Pemenuhan Hak Ekonomi Masyarakat Dan Penyelesaian konflik di Desa Wadas. Diakses December, 2022, dari <https://takeastand-indonesia.or.id/2022/02/26/pemenuhan-hak-ekonomi-masyarakat-dan-penyelesaian-konflik-di-wadas/#:~:text=Penyelesaian%20konflik%20di%20desa%20Wadas%20dapat%20dilakukan%20dengan%20pendekatan%20pertama,batuan%20andesi%20di%20wilayah%20mereka>
- Blau, Peter M. & Schwartz, Joseph E. 1984. *Crosscutting Social Circles: Testing a Macrostructural Theory of Interrelation*. Orlando: Academic Press.
- Buckles, D and Rusnak, G. 1999. *Conflict and Collaboration in Natural Resource Management*. in Buckles, D. et. al. (ed). 1999. *Cultivating Peace: Conflict and Collaboration in Natural Resources Management* IDRC World Bank. Washington D.C.
- CNN Indonesia (2022). 66 Warga Desa Wadas dibebaskan Dan Diberi Sembako Oleh Polisi. Diakses November, 2022, dari <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220209192341-12-757213/66-warga-desa-wadas-dibebaskan-dan-diberi-sembako-oleh-polisi>
- Coser, A Lewis. (1957). *Social Conflict and the Theory of Social Change*. The British Journal of Sociology is currently published by The London School of Economics and Political Science. The British Journal of Sociology, Vol. 8, No. 3. (Sep., 1957), pp. 197-207.
- Darmalaksana, W. (2020a). Cara Menulis Proposal Penelitian. Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
- Gandhawangi, S. (2021). Warga Desa Wadas Ajukan Kasasi. Diakses Desember, 2022, dari <https://www.kompas.id/baca/dikbud/2021/09/15/warga-desa-wadas-ajukan-kasasi>
- Hadi Darmawan, Arya. (2006). *Konflik-Sosial dan Resolusi Konflik: Analisis Sosio-Budaya (Dengan Fokus Perhatian Kalimantan Barat)*. Seminar PERAGI Pontianak 10-11 Januari.
- Harjanto, S. A. (2022). Keputusan Ganjar Jadi PEMICU Warga Wadas Tolak Bendungan Bener. Diakses November, 2022, dari <https://kabar24.bisnis.com/read/20220209/15/1498487/keputusan-ganjar-jadi-pemicu-warga-wadas-tolak-bendungan-bener>
- Mawardi, Margareta. “Kawasan Tambang Quarry di Desa Wadas Direklamasi Agar Memiliki Potensi Wisata”. Halosemarang. Diakses pada 2 November 2022. <https://halosemarang.id/kawasan-tambang-quarry-didesa-wadas-direklamasi-agar-memiliki-potensi-wisata>.
- Miall, Hugh, dkk. *Resolusi Damai Konflik Kontemporer: Menyelesaikan, Mencegah, dan Mengubah Konflik Bersumber Politik, Sosial, Agama, dan Ras*. Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2002.
- Nulhaqim, S. A., Irfan, M., & Adiansah, W. (2017). KONFLIK PADA MASYARAKAT NELAYAN PANTAI UTARA JAWA BARAT (STUDI KASUS: DI DESA ERETAN WETAN KECAMATAN KANDANGHAUR KABUPATEN INDRAMAYU. *Prosiding Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat*, 4(1), 11-28.
- Nusantoro (2018). Warga Wadas Tolak pengerukan Bukit Untuk Proyek Bendungan Bener. Diakses November, 2022, dari <https://www.mongabay.co.id/2018/04/>

- 23/warga-wadas-tolak-pengerukan-bukit-untuk-proyek-bendungan-bener/
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional
- Rizal, J. G. (2022). Apa Yang akan diambil Dari Desa Wadas, Dan Mengapa Warga Menolaknya... halaman 2. Diakses November, 2022, dari <https://www.kompas.com/cekfakta/read/2022/02/09/133632082/apa-yang-akan-diambil-dari-desa-wadas-dan-mengapa-warga-menolaknya?page=2>.
- Saidin, Ernas. 2012. Policy of Social Conflict Resolution; Implementation of The Malino Agreement. *Journal of Government and Politics*. 3 (2): 316-344.
- Salindeho, John, Masalah Tanah dalam Pembangunan Cetakan Kedua, (Yogyakarta: Bernhard Limbong, 2006).
- Sari, H. R. (2022). Kronologi Dan Duduk perkara konflik warga Desa Wadas Dan Aparat. Diakses Desember, 2022, dari <https://www.merdeka.com/peristiwa/kronologi-dan-duduk-perkara-konflik-warga-desa-wadas-dan-aparat-hot-issue.html>
- Sibuea, Harris Y.P. “Konflik Agraria Di Desa Wadas: Pertimbangan Solusi.” *Info Singkat* 14, no. 4 (2022): 1–6.
- Sumardjono, Maria S.W., Kewenangan Negara untuk Mengatur dalam Konsep penguasaan tanah oleh Negara, Pidato Pengukuhan Jabatan Guru besar pada Fakultas Hukum UGM, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 1998.
- Syambudi, I., & Bernie, M. (2021). Brutalitas Polri Ke Warga penolak tambang di wadas Jawa Tengah. Diakses Desember, 2022, dari <https://tirto.id/brutalitas-polri-ke-warga-penolak-tambang-di-wadas-jawa-tengah-gdWG>
- Tidwell, C. A. (1998). *Conflict Resolved?: A Critical Assessment of Conflict Resolution*. London and New York: Continuum.
- Tidwell, C. A., & Lerche, C. (2004). Globalization and Conflict Resolution. *International Journal of Peace Studies*, 9(1).
- Utami, K. D., & Firdaus, H. (2022). Dosen UGM: Skema Pembebasan Lahan tambang di Wadas Bermasalah. Diakses November, 2022, dari <https://www.kompas.id/baca/nusantara/2022/02/09/dosen-ugm-sebut-skema-pembebasan-lahan-tambang-di-wadas-bermasalah>
- Wadas - 'gesekan' antar warga desa, Kata Pemerintah namun pegiat menyebut 'pembungkaman' atas Penolakan Masyarakat - BBC News Indonesia. (2022). Diakses pada November, 2022, dari <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-60322206>
- Wirawan, *Konflik dan Manajemen Konflik, Teori, Aplikasi, dan Penelitian*, (Jakarta: Salemba Humanika, 2013).